KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu tahapan dalam siklus manajemen dalam sebuah organisasi, pelaporan mempunyai peran penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencapaian tujuan dari organisasi. Fungsi pelaporan semakin penting seiring adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut, dan dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan serta saran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya laporan kinerja (LKj) triwulan II tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam melaksanakan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta masa yang akan datang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja laporan kegiatan ini sangat terbuka terhadapsaran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Jakarta, 15 Juli 2024

Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta

Akmadon, S.Pi, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Maksud dan Tujuan 3
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta 3
1.4. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta 3
1.5. Wilayah Kerja 5
1.6. Armada Kapal Pengawas dan Speedboad Pengawas 6
1.7 Kepegawaian 8
1.8. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024 11
2.2. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta 11
2.3. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2024 13
2.4. Perjanjian Kinerja 15
2.5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta 18
3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2024 18
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja 21
3.3.1 Sasaran Kegiatan 1. Terselengaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif 21
3.3.2 Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif 21
3.3.3 Sasaran Kegiatan 3. Terselengaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan 26
3.3.4 Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan dan pemanfaat sumber daya kelautan 27
3.3.5 Sasaran Kegiatan 5. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan 29
3.3.6 Sasaran Kegiatan 6, Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan 30
3.3.7 Sasaran Kegiatan 7, Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang

Kelautan dan Perikanan yang tuntas 32
3.3.8 Sasaran Kegiatan 8, Tata Kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP 33
3.4 Akuntabilitas Keuangan 45

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan 47
4.2. Rekomendasi 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta 6
Tabel 2. Data Armada Kapal Pengawas 7
Tabel 3. Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB 7
Tabel 4. Data Armada Kapal Pengawas Tipe *Speedboat* 7
Tabel 5. Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta 8
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2024 15
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta 18
Tabel 8. Perhitungan Nilai Indeks Operasi Kapal Pengawas 22
Tabel 9. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Kapal Pengawas 22
Tabel 10. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Speedboat 24
Tabel 11. Nilai indeks kinerja operasi speedboat triwulan II tahun 2024 24
Tabel 12. Capaian Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas 25
Tabel 13. IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai) 28
Tabel 14. Perhitungan IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan" 30
Tabel 15. Rekapitulasi IKU “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan” triwulan II tahun 2024 31
Tabel 16. Indeks sanksi administrastif triwulan II tahun 2024 34
Tabel 17. Rekapitulasi Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan triwulan II tahun 2024 35
Tabel 18. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO triwulan II tahun 2024 37
Tabel 19. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) triwulan II tahun 2024 38
Tabel 20. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) triwulan II tahun 2024 42
Tabel 21. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Bulan Maret 2024 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi lingkungan Pangkalan PSDKP Jakarta.....4
Gambar 2. Peta sebaran wilayah kerja lingkungan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta.....5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta.....8
Grafik 2. Rekapitulasi kegiatan kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan 28
Grafik 3. Rekapitulasi Kegiatan yang Mendukung Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan 31

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya dIIImplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta (Pangkalan PSDKP Jakarta) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan misi kedaulatan. Peran tersebut secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pengelolaan kinerja di KKP diatur melalui

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) triwulan II tahun 2024 Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan II tahun 2024 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pangkalan PSDKP Jakarta selama kurun waktu Januari – Juni 2024 dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapatmenjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta

Isu strategis Pengawasan SDKP terkait beberapa kebijakan, yakni :

a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) berbasis resiko;
b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDP) berbasis resiko;
c. *Destructive Fishing* berupa penggunaan bom, bius, dan penyetruman kerap terjadi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;

d. Penangkapan dan distribusi ikan yang dilindungi (*Cites*) yang tidak memiliki dokumen perizinan;
e. Kegiatan peredaran lobster, kepiting dan rajungan yang tidak sesuai ketentuan PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020;
f. Pemanfaatan ruang laut yang harus dilengkapi oleh PKKPRL di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)

Dengan adanya isu aktual tersebut diharapkan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2023 dapat mempunyai peran untuk meningkatkan tertib pelaksanaan perundang-undangan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal wilayah kerja pengawasannya Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu

susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

a. Subbagian Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini:

1.5 Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati, selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa tersebar di satwas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari selatan Pulau Sumatera sampai Jakarta. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 meliputi Perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan WPP 573 Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa. Berikut peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta pada gambar

dibawah ini:

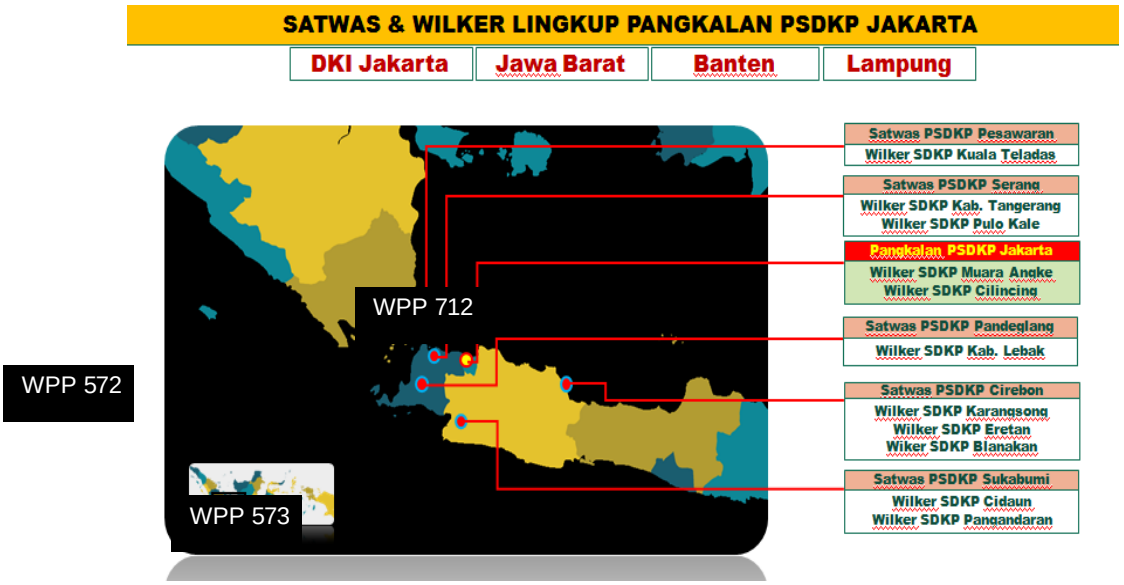

Gambar 1. Peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat.
2	Satwas SDKP Pandeglang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
3	Satwas SDKP Pesawaran	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
4	Satwas SDKP Cirebon	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon

5	Satwas SDKP Sukabumi	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas SDKP Serang	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan, Pangkalan PSDKP Jakarta juga melaksanakan pengawasan di bidang kelautan, budidaya, pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

1.6 Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas

Dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Jakarta didukung 2 (dua) unit armada kapal pengawas, 6 (enam) unit *speedboat* pengawas dan 2 (dua) unit tipe RIB & *Rubber Boat*. Rincian armada kapal pengawas, *speedboat*, RIB & *rubber boat* dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Data Armada Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Tipe Kapal
1	Hiu 10	28 meter	Kelas IV
2	Hiu 06	28 meter	Kelas IV

Tabel 3. Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB & Rubber Boat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	*Sea Rider*	Pangkalan PSDKP Jakarta	8 meter
2	*Rubber Boat*	Satwas SDKP Pandeglang	5 meter

Tabel 4. Data Armada Kapal Pengawas tipe Speedboat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	Napoleon 006	Pangkalan PSDKP Jakarta	12 meter
2	Dolphin 004	Satwas SDKP Serang	8 meter
3	Napoleon 014	Satwas SDKP Pesawaran	12 meter
4	Dolphin 022	Satwas SDKP Cirebon	8 meter
5	Napoleon 052	Satwas SDKP Sukabumi	12 meter
6	Hiu Biru 03	Pangkalan PSDKP Jakarta	11 meter

1.7 Kepegawaian

Sumber daya manusia Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2022 berjumlah 140 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 85 orang, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 55 orang. Data pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	UNIT KERJA	Jumlah		TOTAL
		PNS Ditjen PSDKP	PPNPN	
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	35	33	**70**
2	AKP Kapal Pengawas	18	-	**18**
3	Satwas SDKP Pesawaran	5	3	**8**
4	Satwas SDKP Pandeglang	3	2	**5**
5	Satwas SDKP Serang	4	3	**7**
6	Satwas SDKP Sukabumi	6	6	**10**
7	Satwas SDKP Cirebon	10	8	**18**
8	CPNS	4	-	**4**
Jumlah		**85**	**55**	**140**

Komposisi pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta, Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada grafik dibawah ini:

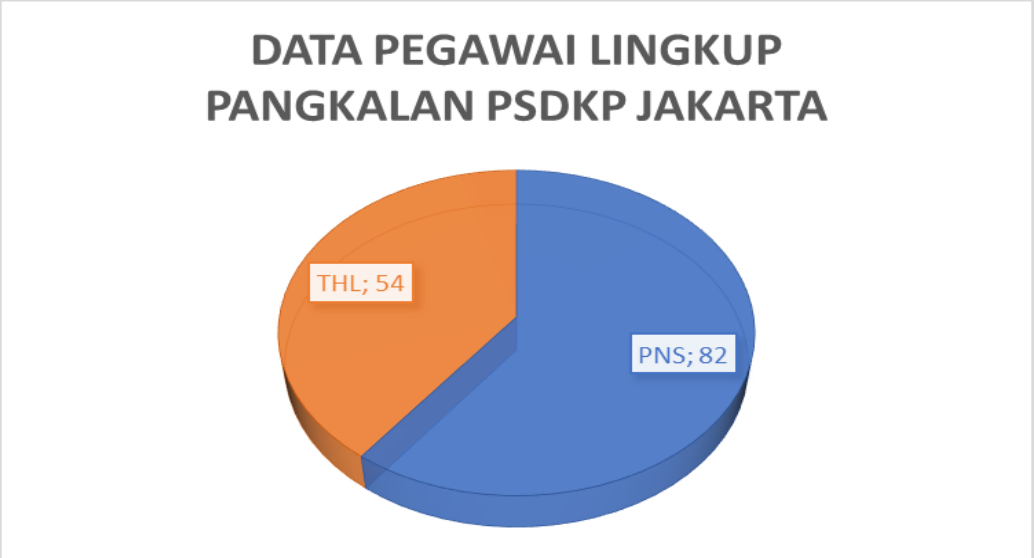

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dari data pada diatas menggambarkan komposisi pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang sebagian besar berstatus PNS dan sebagian berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai daerah dalam melaksanakan fungsi dan menyelesaikan tugas Pengawasan SDKP, diperlukan kesepakatan/aturan antara Dirjen PSDKP dengan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai tersebut serta meningkatkan kompetensi, dapat menugaskan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan.

1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2024 diuraikan pada grapik berikut :

Grafik 2. Bagan sistem penyajian laporan kinerja

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1)Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024; (2) Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta 2020-2024; dan (3) Penetapan Kinerja Tahun 2022.

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (*Outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon IV) yang menghasilkan keluaran (*output*). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2 Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Rencana sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020-2024, merupakan penjabaran dari renstra Eselon I Ditjen

PSDKP, dengan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP;
3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
4. Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Jakarta yang kompeten dan berkepribadian;
5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
6. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pangkalan PSDKP Jakarta yang berkepribadian;
7. Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta secara efisien.

Untuk mencapai program kerja Pengawasan SDKP maka Pangkalan PSDKP Jakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

a. Melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari perusakan dan kegiatan *ilegal*;
b. Mewujudkan ketaatan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan;
c. Terwujudnya industrialisasi perikanan.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-udangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi

2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System*/ISS).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

2.3 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2023

Program Pengawasan Pengelolaan PSDKP

A. Pemantauan dan Operasi Armada
   1. Kinerja Operasi Kapal Pengawas
   2. Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas
   3. Pemenuhan Logistik Armada Pengawas SDKP
   4. POKMASWAS yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP
   5. Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
   6. Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
   1. Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
   2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
   3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal
   4. Pengenaan Sanksi Administratif

C. Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan PerikananPengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
   1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
   2. Pelaku Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan Yang Patuh Terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
   3. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
   4. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap

Peraturan perundang - undangan yang berlaku

5. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing

D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan

E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)
3. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta
4. Indeks Profesionalitas ASN
5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja
6. Inovasi Gugus Kerja Transformasi
7. Kepatuhan Pengelolaan BMN
8. Kepatuhan Pengadaan/Barang Jasa
9. Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
11. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

2.4 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perjanjian kinerja telah ditetapkan pada bulan Januari 2024. Berikut perjanjian kinerja yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		ISK.1.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK.1.3.1	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100%
		ISK.1.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK.2.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	ISK.2.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100%
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	ISK3.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK.3.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	ISK.3.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100%
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		ISK4.1.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK.4.2.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93

2.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh SS yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta dengan Direktur Jenderal PSDKP.

3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2024 ditabulasikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2023

Perspektif/sasaran startegis/Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	Capaian TW II 2024 (%)
SK1.1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif					
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81	50	92,86	120
SK.1.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif					
IKU 2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91	91	91	100
IKU 3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	91	88,57	97,33
IKU 4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100
SK.1.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan					
IKU 5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	-	-	-

IKU 6	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	-	-	-
SK.2.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan					
IKU 7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100	100
SK.2.2 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan					
IKU 8	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100	-	-	-
SK.3.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan					
IKU 9	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100	100
SK.3.2 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan					
IKU 10	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100	-	-	-
SK.4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas					
IKU 11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	60	80	120
IKU 12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	60	80	120
IKU 13	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	93	50	50	100
SK.5.1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
IKU 14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80	80	92,11	115

IKU 15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	75	-	-	-
IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100	100
IKU 17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	70	-	-	-
IKU 18	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	82	77	81,27	106
IKU 19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	84	-	-	-
IKU 20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	80	100	120
IKU 21	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	21	-	-	-
IKU 22	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Jakarta (inovasi)	1	-	-	-
IKU 23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	94	94	121,67	120
IKU 24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80	-	-	-
IKU 25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80	-	-	-
IKU 26	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	93,76	82	90,34	110
IKU 27	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	86	-	-	-

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan tahun 2024 Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Sasaran Kegiatan 1, Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasikan IKU, sebagai berikut :

IKU 1 "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)"

Kelompok Masyarakat Pengawas atau disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP. Pokmaswas merupakan mitra pengawas perikanan melalui laporan atau informasi adanya IUU Fishing di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. IKU ”Persentase POKMASWAS yang aktif yang mendukung pengawasan SDKP (%)” ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP.

Pada periode triwulan II telah dilakukan pembinaan terhadap 6 (enam) lokasi, dengan jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina sebanyak 17 kelompok dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi	Nama Pokmaswas		Nama Ketua & No. HP	Alamat Lengkap Pokmaswas	Dasar Pelaksanaan Kegiatan
1	Jasinga, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat (Ravindra Airlangga)	1.	Pokmaswas Setu Babakan	Iskandarsyah	Desa Babakan. Kec. Dramaga	Surat Tugas Nomor: B.348/PSDKPLan.3/KP.440/II/2024 Tanggal 6 Februari 2024
		2.	Pokmaswas Situ Kodondong	Ukas	Desa Babakan. Kec. Dramaga	Surat Tugas Nomor: B.348/PSDKPLan.3/KP.440/II/2024 Tanggal 6 Februari 2024
2	Cimerak, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat (Bapak K.H. Asep Maoshul Affandi, M.Pd.I.)	3.	Pokmaswas Tunas Bahari	Ade Hadri 085295020774	Kecamatan Pangandaran	Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor: B.1322/PSDKPLan.3/KP.440/V/2024 tanggal 3 Mei 2024
		4.	Pokmaswas Galuh	Jasmin 081214979006	Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang	Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor: B.1322/PSDKPLan.3/KP.440/V/2024 tanggal 3 Mei 2024
		5.	Pokmaswas Cahaya Gumilang	Muslih 082329640550	Desa Sukanagara, Kecamatan Kalipucang	Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor: B.1322/PSDKPLan.3/KP.440/V/2024 tanggal 3 Mei 2024
		6.	Pokmaswas Jaya Tirta Citanduy	Kiswan 085223382723	Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang	Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor: B.1322/PSDKPLan.3/KP.440/V/2024 tanggal 3 Mei 2024

3	Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Sutrisno)	7.	Pokmaswas Sungai Gangga	Didi Supriadi / 081289146528	Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan	Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor: B.1336/PSDKPLan.3/KP.440/V/2024 tanggal 3 Mei 2024
		8.	Pokmaswas Bintang Timur	Nana Ruhyana/ 085222791805	Desa Legonkulon, Kecamatan Mayangan	
4	Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung (Ir. Hanan Rozak, M.S)	9.	Pokmaswas Kaghom Mufakat	Saiman/ 081272569836	Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kab Tanggamus	Surat Tugas Nomor: B.1888/PSDKPLAN.3/KP.440/VI/2024 Tanggal, 12 Juni 2024
		10.	Pokmaswas Ombak Laut	Ponidi/ 081369730828	Desa Panjang, Kecamatan Panjang	
		11.	Pokmaswas Karya Usaha Laut	Abdul Latif	Desa Pesawaran, Kecamatan Teluk Betung	
		12.	Pokmaswas Benteng Bahari	M.Roin/ 082175788577	Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin	
5	Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Haerudin Amin, S.Ag, M.H)	13.	Pokmaswas Sukaratu	Asep	Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi	Surat Tugas Nomor: B.1666/PSDKPLAN.3/KP.440/V/2024 Tanggal, 29 Mei 2024
		14.	Pokmaswas Cangkuang	Ahmad	Situ Cangkuang Kecamatan Leles	
6	Maringgai, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung (Ir. Alimin Abdullah)	15.	Bungur Bahari	Suherman/ 081367125226	Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur	Surat Tugas Nomor: B.1888/PSDKPLAN.3/KP.440/VI/2024 Tanggal, 12 Juni 2024
		16.	Mina Harapan	Warsidi/ Hp.082372539117	Kecamatan Labuhan Maringgai	
		17.	Jaya Bahari Abadi	Halimi/ 082379757171	Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai	

Capaian IKU ini didapatkan dari perhitungan 3 komponen yaitu rencana kerja kegiatan pembinaan, pendataan keaktifan POKMASWAS, dan pelaksanaan kegiatan pembinaan. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Juni 2024 telah dilaksanakan terhada 17 kelompok POKMASWAS. Target pada triwulan II adalah 50 indeks. Capaian sampai dengan Juni adalah 92,86 dengan total 7 lokasi sedangkan kegiatan baru dilaksanakan pada 6 lokasi, akan tetapi rencana kerja kegiatan pembinaan dan pendataan keaktifan POKMASWAS sudah dilaksanakan. Berikut rincian perhitungan IKU “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)”:

No.	Nama Kegiatan	Perhitungan Capaian Kinerja		Nilai	Keterangan/Data Dukung
		Target	Realisasi		
1.	Rencana Kerja Kegiatan Pembinaan POKMASWAS (20%)				
	a. Target Per Triwulan (50%)	1	1	50%	Rencana Kerja Kegiatan Pembinaan POKMASWAS
	b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (50%)	1	1	50%	
Nilai Total				**20%**	
2.	Pendataan Keaktifan POKMASWAS (30%)				
	a. Form Keaktifan POKMASWAS (50%)	1	1	50%	Pendataan Keaktifan POKMASWAS
	b. Database Kelompok POKMASWAS (50%)	1	1	50%	

Nilai Total				**30%**	
3.	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan (50%)				
	a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan (50%)	7	6	42,86%	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
	b. Dokumentasi (50%)	7	6	42,86%	
Nilai Total				**42,86%**	
Total Indeks				**92,86%**	

Alokasi anggaran untuk IKU "Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%) sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Realisasi anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 423,756,747,- sehingga telah tercapai 32,60%.

3.3.2 Sasaran Kegiatan 2, Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

IKU 2 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)"

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (40%);
2. Cakupan wilayah pengawasan (40%);
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (15%);
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (5%).

Berikut nilai dari setiap variabel pada kegiatan operasi kapal pengawas:

Tabel 8. Perhitungan Nilai Indeks Operasi Kapal Pengawas

No.	Kegiatan	KP. Hiu 06			KP. Hiu 10		
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai
1.	Pemeriksaan (40%)						
	a. Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	45	60	70%	45	48	70%
	b. Pemeriksaan Kelautan (30%)	2	1	15%	1	0	0
Nilai Total				**34%**			**28%**
2.	*Coverage Area* Pengawasan (40%)	0,07	0,14	40%	0,07	0,08	40%
Nilai Total				**40%**			**40%**
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)						
	a. *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (60%)	0	1	60%	0	2	60%
	b. Dukungan Kegiatan SAR (40%)	0	0	40%	0	0	40%
Nilai Total				**15%**			**15%**
4.	Hasil Dukungan Operasi Lainnya (5%)						
	a. Jumlah Penyitaan Alkap Terlarang (30%)	0	0	30%	0	1	30%
	b. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)	0	0	30%	0	0	30%
	c. Dukungan Ops Bersama (40%)	0	0	40%	0	0	40%
Nilai Total				**5%**			**5%**
Total Nilai Indeks				**94%**			**88%**
TOTAL				**91%**			

Kinerja kapal pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta terdiri dari kapal pengawas Hiu 06 dan Hiu 10. Sebagian besar variabel telah memenuhi target yang ditentukan, hanya terdapat 1 (satu) komponen pada variabel pemeriksaan yang belum memenuhi target yaitu kegiatan pemeriksaan kelautan belum terlaksana. Target pemeriksaan kelautan (30%) dengan target 2 kegiatan pemeriksaan kelautan. Pemeriksaan kelautan telah terlaksana 1 kegiatan karena target baru di sosialisasikan pada triwulan II. Nilai total keseleuruhan dari kegiatan kinerja operasi kapal pengawas sebesar 91, nilai tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga capaian untuk IKU ini adalah 100%. Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas periode triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Kapal Pengawas

SUB IKU	TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kinerja Kapal Pengawas (Indeks)	91	91	100

Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan rencana operasi yang telah direncakan. Kesesuai tersebut tidak lepas dari peran serta tim perencanaan yang selalu berkoordinasi dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk mengetahui perhitungan yang sesuai dengan manual iku. Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023, realisasi tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya. Meningkatnya IKU ini dari 87,6 menjadi 91 dikarenakan pada tahun 2023 kegiatan operasi kapal pengawas berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terdapat kerusakan pada kapal pengawas seperti tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp 7,485,787,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2,567,420,231 (34,30%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 34,30% dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien.

IKU 3 "Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas"

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni :

1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
2) Cakupan wilayah pengawasan;
3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;

4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 10. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Speedboat

SUB IKU	TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kinerja *Speedboat* (Indeks)	91	88,57	97,33

Indeks kinerja operasi *speedboat* pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2024 adalah 88,57 dengan target yang telah ditentukan sebesar 91, sehingga nilai capaian IKU ini sebesar 97,33%. Kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan target pemeriksaan kelautan sebesar 4 kegiatan belum semuanya tercapai, target baru disosialisasikan pada triwulan II dan pada triwulan III diharapkan semua target pemeriksaan terkait kelautan akan sesuai target. Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2024, pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Nilai indeks kinerja operasi speedboat triwulan II tahun 2024

No.	Kegiatan	SP. Hiu Biru			SP. Sea Rider (RIB)			SP. Napoleon 006			SP. Napoleon 014			SP. Napoleon 052			SP. Dolphin 004			Rubber Boat		
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai
1	Pemeriksaan (40%)																					
	a. Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	30	38	50%	15	18	50%	15	18	50%	15	25	50%	15	31	50%	15	46	50%	15	15	50%
	b. Pemeriksaan Kelautan (50%)	4	5	50%	4	0	0	4	0	0	4	1	12,5%	4	17	50%	4	3	37,5%	4	0	0
	Nilai Total			**40%**			**20%**			**20%**			**25%**			**40%**			**35%**			**20%**
2.	*Coverage Area* Pengawasan (40%)	0,0166	0,0282	40%	0,0083	0,0110	40%	0,0050	0,0050	40%	0,0108	0,0112	40%	0,0083	0,0124	40%	0,0183	0,0197	40%	0,0124	0,0124	40%
	Nilai Total			**40%**			**40%**			**40%**			**40%**			**40%**			**40%**			**40%**
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)																					
	a. *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (60%)	0	0	60%	0	0	60%	0	0	60%	0	0	60%	0	0	60%	0	0	60%	0	0	60%
	b. Dukungan Kegiatan SAR (40%)	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%
	Nilai Total			**15%**			**15%**			**15%**			**15%**			**15%**			**15%**			**15%**
4.	Hasil Dukungan Operasi Lainnya (5%)																					
	a. Jumlah Penyitaan Alkap Terlarang (40%)	0	0	40%	0	4	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%
	b. Dukungan Ops Bersama (20%)	0	0	20%	0	0	20%	0	0	20%	0	0	20%	0	0	20%	0	0	20%	0	0	20%
	c. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%
	Nilai Total			**5%**			**5%**			**5%**			**5%**			**5%**			**5%**			**5%**
	Total Nilai Indeks			**100%**			**80%**			**80%**			**85%**			**100%**			**95%**			**80%**
	TOTAL	**88,57%**																				

Berdasarkan tabel diatas, realisasi nilai indeks kinerja operasi *speedboat* Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 88,57. Nilai tersebut diperolah dari beberapa indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah dicapai sampai dengan Juni 2024. Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023, realisasi tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Menurunnya

capaian pada IKU ini dari 90,12 menjadi 88,57 dikarenkan pada tahun 2024 kegiatan operasi *speedboat* berjalan sesuai dengan rencana akan tetapi terdapat kerusakan mesin pada beberpa *speedboat* pada tahun 2024 dan mempengaruhi kegiatan pemeriksaan kelautan pada triwulan II.

Alokasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung IKU Indeks Kinerja *Speedboat* Pengawas sebesar Rp 1,134,361,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 284,018,456,- (25,04%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 97,33% dan realisasi anggaran sebesar 25,04% dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien.

IKU 4 "Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)"

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan logistik kapal dan pemenuhan logistik personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas. Logistik Personel terdiri dari bahan makanan, air tawar, dan alat-alat pelayanan (ATK, bahan komputer, komaliwan, peta dan atau buku jurnal deck & mesin).

Kegiatan pemenuhan logistik armada kapal pengawas telah terlaksana dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan BBM dari Januari-Juni yang berasal dari berita acara BBM akhir bulan;
2. Pemenuhan kebutuhan pelumas dari Januari-Juni yang berasal dari Surat Permintaan Kebutuhan BBM dari Kapal Ke Kantor dan SPJ Pembelian/BAST;
3. Pemenuhan kebutuhan bahan makan dari bulan Januari-Juni yang berasal Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian;
4. Pemenuhan kebutuhan air tawar setiap bulan dari Januari-Juni yang berasal dari Surat Pengantar Kebutuhan Air Tawar dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian;
5. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan setiap bulan dari Januari-Juni yang berasal dari Surat Pengantar Kebutuhan ATK, CS, Jurnal Deck/Mesin, Peta Laut, Buku Pasang Surut dan alat alat layanan lainnya.

Berikut rekapitulasi persentase pemenuhan logistik kapal pengawas berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini :

Tabel 12. Capaian Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

SUB IKU	TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100

Indikator logistik diatas telah terpenuhi selama periode triwulan I sehingga realisasi yang dicapai Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 100% yaitu sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 100%. Capaian IKU "Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas" diperoleh sebesar 100%. Kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditentukan merupakan suatu keberhasilan yang dicapai. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya pegawai yang kompeten dalam pelaksanaan kebutuhan logistik armada pengawasan SDKP dan adanya komunikasi yang baik antara awak kapal pengawas dengan Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Jakarta.

IKU "Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)" merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung IKU Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP sebesar Rp 4,851,717,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1,859,743,000,- (38,33%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 38,33% dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien.

3.3.3 Sasaran Kegiatan 3, Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan", Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan IKU, sebagai berikut :

IKU 5 “Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)”

Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) adalah persentase progres pelaksanaan pengadaan pembangunan/ renovasi/ rehabilitas/ restorasi. Pangkalan PSDKP Jakarta akan melaksanakan pembangunan kalamo di Satwas SDKP Sukabumi dan pengurugan lahan dibelakang mess kantor Pangkalan PSDKP Jakarta. Pada periode triwulan II tahun 2024, kegiatan persentase sarana dan prasarana belum selesai dilaksanakan, dan perhitungan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

IKU 6 “Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Kegiatan “Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” merupakan jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana pengawasan SDKP meliputi : 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 7 (tujuh) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

a. perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%);
b. perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %);
c. perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).

Pada periode triwulan II tahun 2024, kegiatan persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP sudah terlaksana melalui perawatan rutin per bulan, dan perhitungan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

3.3.4 Sasaran Kegiatan 4, Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan” yaitu upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Berikut kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan tersebut:

IKU 7 " Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)"

Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai) pada triwulan I tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Hasil pengukuran 5 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 13. IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)

SUB IKU	TRIWULAN I TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI	(%)
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100

Dari data diatas, realisasi IKU pada triwulan II tahun 2024 mencapai 100 dengan target sebesar 100 sehingga memporeleh capaian sebesar 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan sebanyak 44 pelaku usaha yang berada di lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas sudah memenuhi tahapan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Berikut grafik kinerja pengawasan kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan:

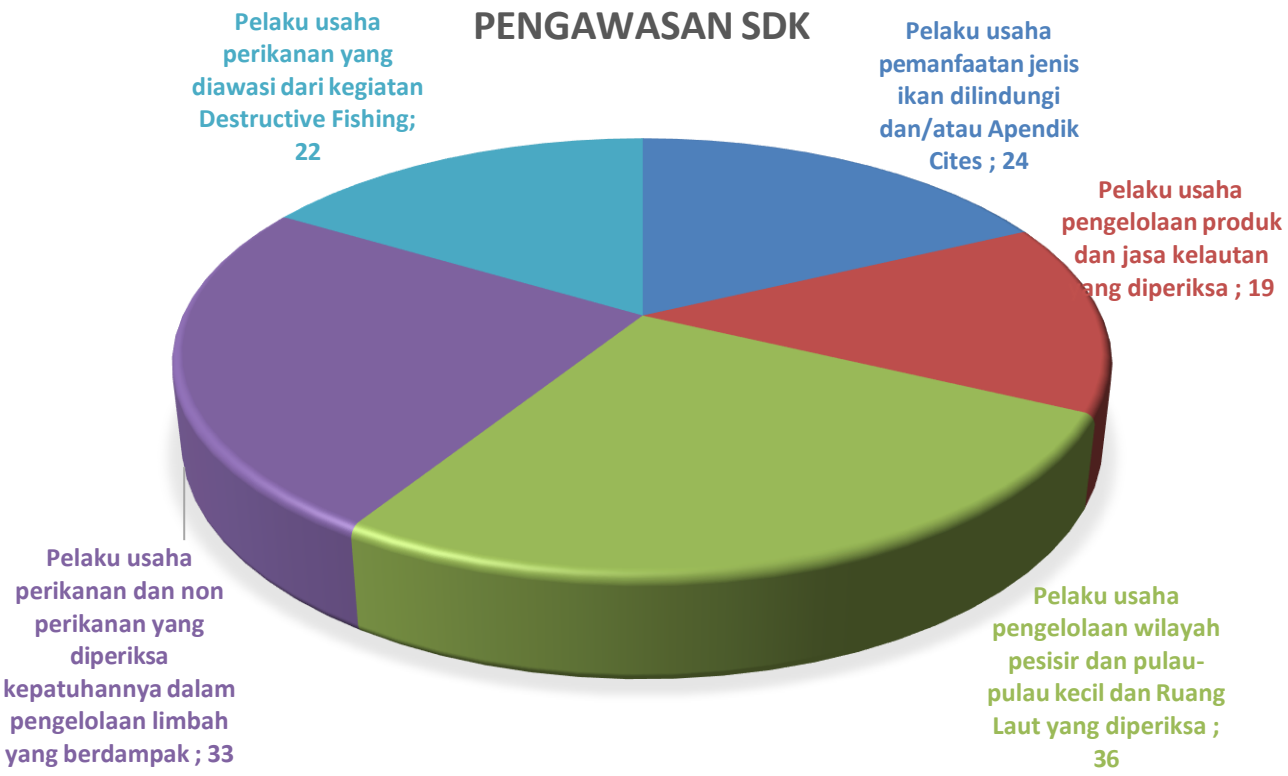

Grafik 2. Rekapitulasi kegiatan kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

Pada grafik diatas terlihat nilai tertinggi yang dilakukan pada pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah kegiatan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa dengan total jumlah 36 pelaku usaha. Nilai terendah adalah kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa dengan jumlah 19 pelaku usaha. Total jumlah pelaku usaha sampai dengan Juni 2024 adalah 134 pelaku usaha.

Perbandingan dengan triwulan II tahun 2023, capaian untuk kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah 100% dengan jumlah pelaku usaha yang telah diawasi sebanyak 92 pelaku usaha. Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya selama periode ini dengan meningkatkan jumlah pelaku pengawasan dari 92 menjadi 134 pelaku usaha. Meningkatnya pengawasan pelaku usaha kelautan dikarenakan telah dilakukan perencanaan dengan baik oleh tim kerja SDK yaitu mengelompokkan pengawasan berdasarkan lokasi.

Alokasi anggaran untuk IKU “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)” sebesar Rp 2,111,415,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 349,799,544,- (16,57%). Realisasi anggaran masih rendah dikarenakan terdapat kegiatan yang anggarannya masih dalam proses pencairan.

3.3.5 Sasaran Kegiatan 5, Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan

Dalam rangka pencapaian SK “Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan IKU, sebagai berikut :

IKU 8 "Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)”

Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta belum melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan dikarenakan perhitungan dilaksanakan pada akhir tahun. Kegiatan memperlukan persiapan terkait kasus yang sedang marak di wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta, sehingga perlu adanya peninjauan lokasi terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan.

3.3.6 Sasaran Kegiatan 6, Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

IKU 9 "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (Nilai)”

Penentuan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Perhitungan IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan"

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa;	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan

	c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.		
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

. Perhitungan realisasi berdasarkan tahapan pemeriksaan yaitu persiapan, pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha dan penyusunan laporan hasil pengawasan yang ditembuskan kepada Direktur PPSDP. Pengawasan yang telah diperiksa dan sesuai dengan tahapan pemeriksaan akan memperoleh nilai 100. Target IKU ini sebesar 100, maka capaian yang didaptkan adalah 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan didukung adanya personal pengawas perikanan yang kompeten dan mendokumentasikan kegiatan pengawas langsung dihari yang sama pada grup *Whatsapp* Pangkalan PSKDP Jakarta.

Pada triwulan II tahun 2024, IKU ini sudah terealisasi sebanyak 355 ID proyek dari 5 kegiatan pengawasan. Seluruh kode proyek yang diperiksa telah memenuhi tahapan pemeriksaan sehingga capaian pada tahun ini 100% dengan target sebesar 100% sehingga realisasi sesuai dengan target. Lokasi pengawasan dilaksanakan di sekitar wilayah Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Tabel 15. Rekapitulasi IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan" triwulan II tahun 2024

SUB IKU	TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100	100	100

Pada triwulan II tahun 2024, pengawasan yang telah sesuai dengan tahapan pemeriksaan sebanyak 355 ID proyek. Pengawasan tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan berdasarkan kode proyek yaitu pelaku usaha pembudidaya ikan, penangkapan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan serta kampung budidaya. Berikut rekapitulasi jumlah kegiatan

pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaatan sumber daya perikanan di Pangkalan PSDKP Jakarta :

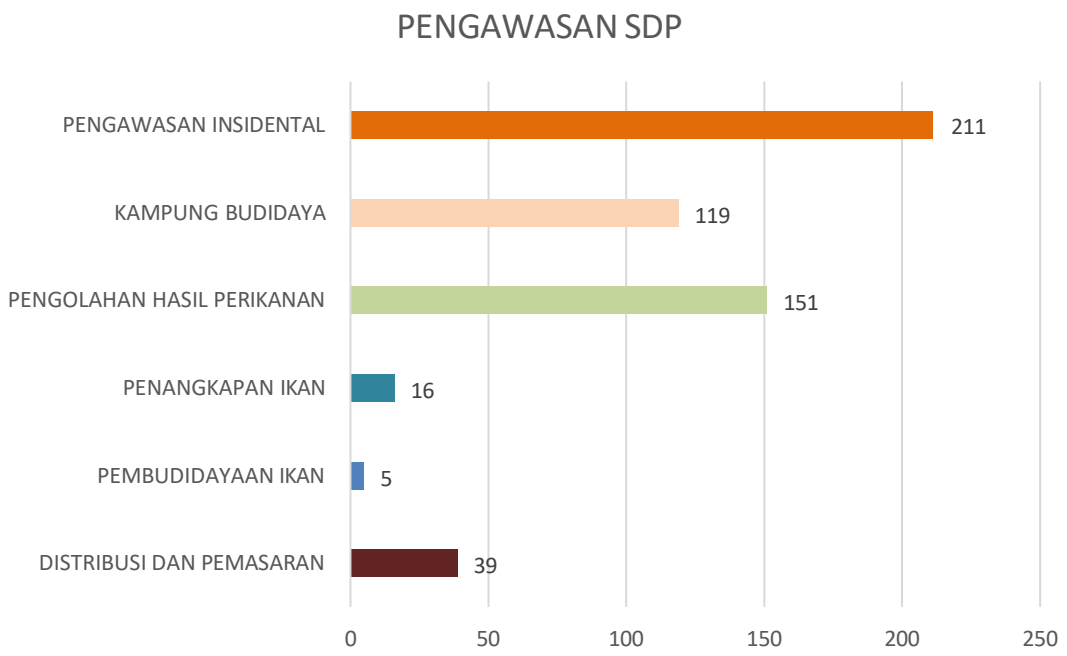

Grafik 3. Rekapitulasi Kegiatan yang Mendukung Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

Pada periode triwulan II tahun 2023 kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100% dengan jumlah pengawasan terhadap 158 KBLI/kode proyek sedangkan pada periode tahun ini telah tercapai 355 kode proyek dengan capaian 100%. Berdasarkan kuantitas nilai triwulan II tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya dan secara capaian Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerjanya sebesar 100%.

Alokasi anggaran triwulan II tahun 2024 untuk mendukung IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp 2,211,790,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 562,526,319,- (25,43%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 7,7% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien karena kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan adanya penggabungan kegiatan pengawasan UPI dengan pengawasan distribusi pada periode ini.

3.3.7 Sasaran Kegiatan 6, Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan

Dalam rangka pencapaian SK “Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan IKU, sebagai berikut :

IKU 10 "Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)”

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha adalah perbandingan nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidentil.

Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta belum melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan dikarenakan perhitungan dilaksanakan pada akhir tahun.

3.3.7 Sasaran Kegiatan 8, Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasikan IKU, sebagai berikut :

IKU 11 “Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)”

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada :

- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan rata-rata capaian komponen SPKP dan komponen selain SPKP yaitu PIT, SEDIMENTASI, PKKPRL, dll. Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan melalui sistem pemantauan kapal perikanan. Sampai dengan Juni 2024, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran SPKP sebanyak 390 kasus pelanggaran dan seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan berupa Proses BAP sebanyak 28 kasus, bukan pelanggaran 209 kasus, SP 1 sebanyak 147 kasus dan SP 2 sebanyak 6 kasus sehingga capaian untuk komponen SPKP sebesar 100%. Capaian untuk komponen selain SPKP sampai dengan Juni 2024 sebesar 75%, yang didapatkan dari tindak lanjut 10 kasus dari 13 kasus PKKPRL dan Perizinan berusaha. Capaian untuk IKU ini sebesar 83,33% dan berdasarkan kriteria indeks, persentase 83,33% termasuk kedalam nilai indeks maksimal 80 dengan kriteria “baik” sehingga capaian pada IKU ini sebesar 100% karna nilai indeks sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tabel 16. Indeks sanksi administrastif triwulan I tahun 2024

SUB IKU	TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
Indeks sanksi administratif	80	80	100

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan memiliki satuan target dan perhitungan yang berbeda. Pada triwulan II tahun 2023, IKU ini memiliki satuan persentase dan pada tahun ini memiliki satuan indeks. Secara output kasus pelanggaran tahun ini lebih banyak, dengan total kasus di tahun 2023

sebanyak 179 kasus. Meningkatnya kasus pelanggaran melalui sistem pemantauan kapal perikanan dikarenakan adanya pengendalian pengawasan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 telah dibentuk tim kerja penanganan pelanggaran di setiap UPT, termasuk Pangkalan PSDKP Jakarta. Tim kerja ini meningkatkan produktivitas kegiatan di bidang penanganan pelanggaran.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 626,000,000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 86,191,039 (13,77%). Realisasi anggaran masih rendah dikarenakan terdapat kegiatan yang anggarannya cukup besar belum terlaksana yaitu sosialisasi yang melibatkan pelaku usaha. Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III. Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 13,77% dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien.

IKU 12 “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perhitungan kegiatan ini. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Pada periode triwulan II tahun 2024, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan rekapitulasi kapal perikanan yang terindikasi pelanggaran berdasarkan surat dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Total kapal perikanan yang melanggar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 153 kapal yang kemudian dilakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sampai dengan Juni 2024, pengawas perikanan telah melakukan klarifikasi sebanyak 153 orang/pelaku usaha. Realisasi untuk IKU ini sebesar 100% dan berdasarkan kriteria indeks, persentase 100% termasuk kedalam nilai indeks maksimal 80 dengan kriteria “baik” sehingga capaian pada IKU ini sebesar 100% karna nilai indeks sesuai dengan target yang

telah ditentukan.

Tabel 17. Rekapitulasi Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan triwulan I tahun 2024

SUB IKU	TRIWULAN I TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100	100	100

3.3.8 Sasaran Kegiatan 9, Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas

Dalam rangka pencapaian SK "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas", Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasikan IKU, sebagai berikut :

IKU 13 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)"

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di claim sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.

Sampai dengan Juni 2024, tidak terdapat kasus tindak pidana dan kelautan di Pangkalan PSDKP Jakarta. Berdasarkan manual iku apabila tidak terdapat kasus maka capaian sama dengan target yang ditentukan. Target untuk kegiatan ini sebesar 50, sehingga realisasai IKU "Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)" sebesar 50 dengan capaian sebesar 100%.

3.3.8 Sasaran Kegiatan 10, Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Dalam rangka pencapaian SK “Tata Kelola Pemerintah yang Baik lingkup Ditjen PSDKP”, berikut beberapa IKU yang menunjang SK 10 :

IKU 14 “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)”

Indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari nilai SKM yang dilaksanakan setiap triwulan sekali melalui aplikasi Susan KKP. Nilai SKM pada triwulan II tahun 2024 merupakan nilai IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)” yaitu sebesar 92,11 dengan capaian sebesar 115%. Berikut nilai kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode triwulan II tahun 2024 :

Tabel 18. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta triwulan II

IKU	2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80	92,11	115

Capaia triwulan II adalah hasil rata-rata dari triwulan I dan II. Nilai tersebut didapatkan dari aplikasi SUSAN KKP. Berikut adalah rincian nilai “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)” Pangkalan PSDKP Jakarta :

Table 19. Perhitungan IKU " Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta"

Kegiatan	Triwulan I	Triwulan II	Rata-Rata
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pangkalan PSKDP Jakarta	92,46	91,76	**92,11**

Kegiatan ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada triwulan II tahun 2023, nilai IKM di dapatkan pada survey kepuasan masyrakat secara manual atau menggunakan form/kertas yang diisi oleh pengguna layanan, akan tetapi tahun ini pengisian sudah menggunkan *mobile* melalu aplikasi Susan KKP.

IKU 15 "Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)

Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak pencanangan pertama pada Oktober 2017. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komponen penilaian dalam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi mananjemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabiltas kinerja, penguatan pengawasan, dan kualitas pelayanan publik.

IKU 16 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)"

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan

anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Pada triwulan II tahun 2024, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengendalian manajemen risiko yang dituangkan dalam form pengendalian dan pemantauan risiko. Rencana pengendalian risiko sebanyak 24 dokumen. Dokumen tersebut telah terpenuhi sebanyak 24 dokumen setiap triwulan dan disampaikan kepada tim SPIP, sehingga didapatkan capaian IKU ini sebesar 100%.

Tabel 19. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) triwulan II tahun 2024

IKU	2023		
	Target	Realisasi	Capaian(%)
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100

Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta telah dilakukan secara rutin setiap triwulan dari tahun 2023, sehingga capaian dari tahun sebelumnya sama dengan tahun ini. Kegiatan ini juga rutin dipantau oleh Sesditjen PSDKP melalui luring maupun daring lingkup Ditjen PSDKP.

IKU 17 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)”

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pangkalan PSKDP Jakarta akan melaksanakan kegiatan “Nilai Pengawasan Kearsipan Interla lingkup Ditjen. PSDKP” pada triwulan IV atau akhir tahun. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

IKU 18 “Indeks Prefesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Pengukuran kegiatan ini dilakukan setiap semester. Berdasarkan IK yang digunakan Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) kinerja; dan (4)

Disiplin. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2023. beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini antara lain:

a. Melakukan update data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll.
b. Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui *finger print online*.
c. Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP
d. Pembinaan pegawai pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Pada Semester II, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mendapatkan nilai ASN sebesar 81,27 dengan ketegori “Tinggi”. Nilai tersebut menunjukan bahwa Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target yaitu 77 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 120%. Nilai tersebut diperoleh pada ropeg.kkp.go.id dan telah disahkan pada Memorandum

Sekretaris Ditjen. PSDKP dengan Nomor : 1282/PSDKP.1/KP.720/VII/2024. Dengan rincian perhitungan IKU sebagai berikut :

IKU	Triwulan I Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian(%)
Indeks Prefesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	77	81,27	120

IKU 19 "Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)"

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024 atau pada bulan Juli 2023.

IKU 20 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)"

Capaian kinerja IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP jakrta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapai dan disampaikan (%)" diperoleh dari jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pangkalan PSDKP Jakarta berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 s.d 31 Maret 2024 yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Selama periode LHP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta memperoleh 10 (sepuluh) jumlah rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Seluruh rekomendasi tersebut telah diselesaikan dan ditindaklanjuti sehingga realisasi IKU ini sebesar 100% sesuai dengan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor : B.2762/PSDKP.1/TU.140/VII/2024. Berikut perhitungan capaian IKU " Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)" :

IKU	Triwulan II Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian(%)
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	100	120

IKU 21 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)"

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Pangkalan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pada peridoe triwulan I, Pangkalan PSKDP Jakarta telah melaksanakan kegiatan implementasi budaya kerja secara berkala. Penilaian IKU "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)" akan dilaksanakan pada triwulan III atau triwulan IV sehingga realisasi pada triwulan I adalah pemenuhan data dukung kegiatan budaya kerja.

IKU 22 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta (Inovasi)"

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan.

Pada peridoe triwulan I, Pangkalan PSKDP Jakarta telah melaksanakan kegiatan implementasi budaya kerja secara berkala. Penilaian IKU "Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)" akan dilaksanakan pada triwulan III atau triwulan IV sehingga realisasi pada triwulan I adalah pemenuhan data dukung kegiatan budaya kerja.

IKU 23 "Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)"

Pangkalan PSDKP Jakarta menggunakan sistem manajemen yang sama yang digunakan di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Bitriks. Perhitungan capaian ini didasarkan atas 3 komponen yaitu: (1)Dokumen; (2)Keikutsertaan (3)Keaktifan. Realisasi IKU "Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengatahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" triwulan II tahun 2024 sebesar 121,67%. Target yang ditentukan pada tahun ini adalah 94%, sehingga di dapatkan capaian IKU ini sebesar 120%. Berikut nilai unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar periode triwulan II tahun 2024:

Tabel 20. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) triwulan II tahun 2024

IKU	Triwulan II Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengatahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	94	121,67	120

IKU 24 "Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)"

Kegiatan "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan Desember 2024.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2023 berdasarkan jumlah nilai dari 5 unsur. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;

4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada periode triwulan II, Pangkalan PSKDP Jakarta akan melaksanakan IKU "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" pada triwulan IV atau akhir tahun.

IKU 25 "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)"

Kegiatan "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan Desember 2024. Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta diukur berdasarkan jumlah nilai dari 6 (enam) komponen. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

IKU 26 "Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)"

Capaian kinerja IKU "Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta" diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran IK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4

(empat), antara lain :

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;
b. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA > 95;
c. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA >70

Pada periode triwulan II, Realisasi Pangkalan PSKDP Jakarta pada IKU “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” sebesar 90,34. Target pada kegiatan ini adalah 82, dengan kata lain capaian Pangkalan PSDKPJakarta adalah 110,17%. Berikut adalah rincian perhitungan pada IKU “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”:

IKU	Triwulan II Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian %
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	82	90,34	110,17

IKU 27 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)"

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta kedalam aplikasi SMART DJA (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Pengukuran kinerja IKU ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum ada realisasi pada triwulan II tahun 2024.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp. 42.222.301.000,- dan telah disahkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2024.

Table 21. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Bulan Juni 2024

Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi S/D Desember 2023	%
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	Rp. 14,152,064,000	Rp. 4,240,712,044	29,97%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 754,000,000	Rp. 88,588,502	11,75%
2352	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Rp. 2,111,415,000	Rp. 349,799,544	16,57%
2353	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Rp. 2,211,790,000	Rp. 562,526,319	25,43%
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	Rp. 22,993,032,000	Rp. 11,270,508,767	49,02 %
	Total	**Rp. 42,222,301,000**	**Rp. 16,512,135,176**	**39,11 %**

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKJ) periode triwulan II tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta selama bulan Januari – Juni 2024. yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam setiap triwulan berjalan dan triwulan sebelumnya. Pangkalan PSDKP Jakarta sebagian besar telah memenuhi seluruh target IKU yang ditentukan pada triwulan II dengan jumlah 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target yaitu IKU “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)”. IKU tidak tercapai dikarenakan belum dilaksanakannya kegiatan pengawasan SDK pada patroli speedboat. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan Juni tahun 2024 sebesar 107,39.

4.2 Rekomendasi

Melibatkan Tim SDK dalam pelaksanaan kegiatan patroli speedboat pada triwulan III, sehingga capaian pada IKU “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)” tercapai.

4.3 Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan sebelumnya	Tindak Lanjut
Tidak ada permasalahan yang terjadi selama pemenuhan kinerja pada periode triwulan I sehingga tidak ada rekomendasi pada triwulan ini	Tidak ada tindak lanjut yang terjadi karena tidak ada rekomendasi pada periode triwulan I